KomnasHAM

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2009

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat
Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227
www.komnasham.go.id

KOMNASHAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ji Binaraih
Penyusunan Program

KomnasHAM

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2009

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat
Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227
www.komnasham.go.id

KOMNASHAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KATA PENGANTAR

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2009 berarti Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2009-2013 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2009, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Komnas HAM untuk tahun 2009 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat dan staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jakarta, Mei 2010

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal

Sudibyo Triatmodjo
NIP. 180002021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Ringkasan Eksekutif v

Bab I. Pendahahuluan 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1

B. Aspek Strategik Organisasi 3

C. Struktur Organisasi 3

Bab II. Perencanaan Strategik Organisasi 5

A. Rencana Strategik 5

1. Pernyataan Visi 5

2. Pernyataan Misi 5

3. Tujuan dan Sasaran 6

B. Rencana Kinerja 7

Bab III. Akuntabilitas Kinerja 11

A. Pengukuran Kinerja 11

B. Analisis Pencapaian Sasaran 11

Bab IV. Penutup 25

Lampiran

- Formulir Rencana Strategis
- Formulir Rencana Kerja Tahunan
- Penetapan Kinerja
- Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran
- Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebelum menetapkan tujuan serta sasaran organisasi, setiap instansi terlebih dahulu menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dan Misi Komnas HAM 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Misi :

Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:

1) **Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;**
2) **Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;**
3) **Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;**
4) **Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;**
5) **Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (*social justice*);**
6) **Memperkuat kesadaran aparatur negara dan *civil society* atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;**
7) **Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (*stake-holder*) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.**

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Komnas HAM telah menetapkan tujuh tujuan strategis dan 26 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima)

program. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, capaian kinerja Komnas HAM TA 2009 adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian
   Sepanjang TA 2009 telah dilakukan pengkajian dan penelitian instrumen internasional hak asasi manusia maupun peraturan perundang-undangan nasional dengan capaian 166,67% atau sebanyak 10 peraturan perundang-undangan yang berhasil dikaji dan diteliti.

2. Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan
   Dalam rangka penyebarluasan wawasan tentang hak asasi manusia, Komnas HAM diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pendidikan dan penyuluhan kepada publik. Pendidikan dan penyuluhan HAM yang telah dilakukan meliputi 30 tema sebagai berikut:
   1. Penyelenggaraan Penyuluhan dengan tema:
      1.1. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk Rakyat" dengan tema: Privatisasi Air Menyengsarakan Rakyat.
      1.2. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk rakyat" dengan tema: Mencari Solusi Kontroversi Perda Tibum.
      1.3. Penyuluhan HAM: Mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat pedesaan di Mataram.

   2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM dengan perincian sebagai berikut:
      2.1. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
      2.2. Pendidikan HAM Bagi Kalangan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Bandung Barat.
      2.3. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
      2.4. Pelatihan HAM Dasar (BHRT 2009).
      2.5. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Kalimantan Barat.

2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi Jambi.
2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
2.13. Pelatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM

3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.

2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi Jambi.
2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
2.13. Pelatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM

3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Inpres 7 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap pimpinan kementrian/lembaga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja instansi masing-masing yang sering disebut LAKIP. Laporan kinerja tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kemenneg PAN, yang saat ini sebutannya telah berubah menjadi Kemenneg PAN dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Komnas HAM telah menyusun LAKIP Komnas HAM 2009 sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Komnas HAM, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia, adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dengan ditetapkannya UU 39/1999, Komnas HAM mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan Komnas HAM, sebagaimana ditetapkan oleh UU 39/1999, adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan:

a. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional

HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
c. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhaadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.

Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaian sengketa melalui pengadilan;
d. Penyelesaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintahan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

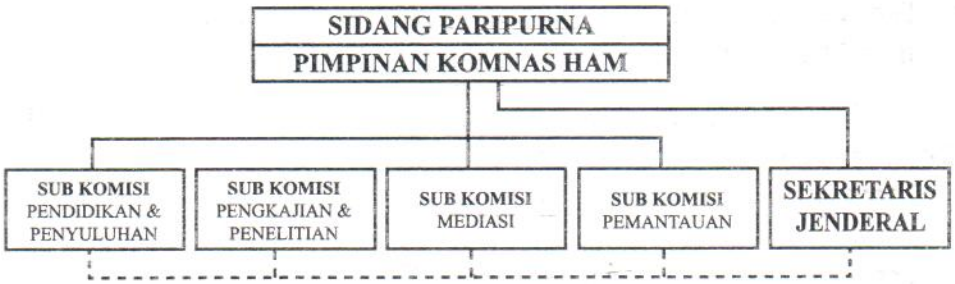
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Peran strategik yang dijalankan oleh Komnas HAM yaitu: **Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh (holistik), non diskriminasi, dan berkelanjutan.**

Sesuai dengan peran tersebut, maka Komnas HAM senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam penciptaan situasi yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjung nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

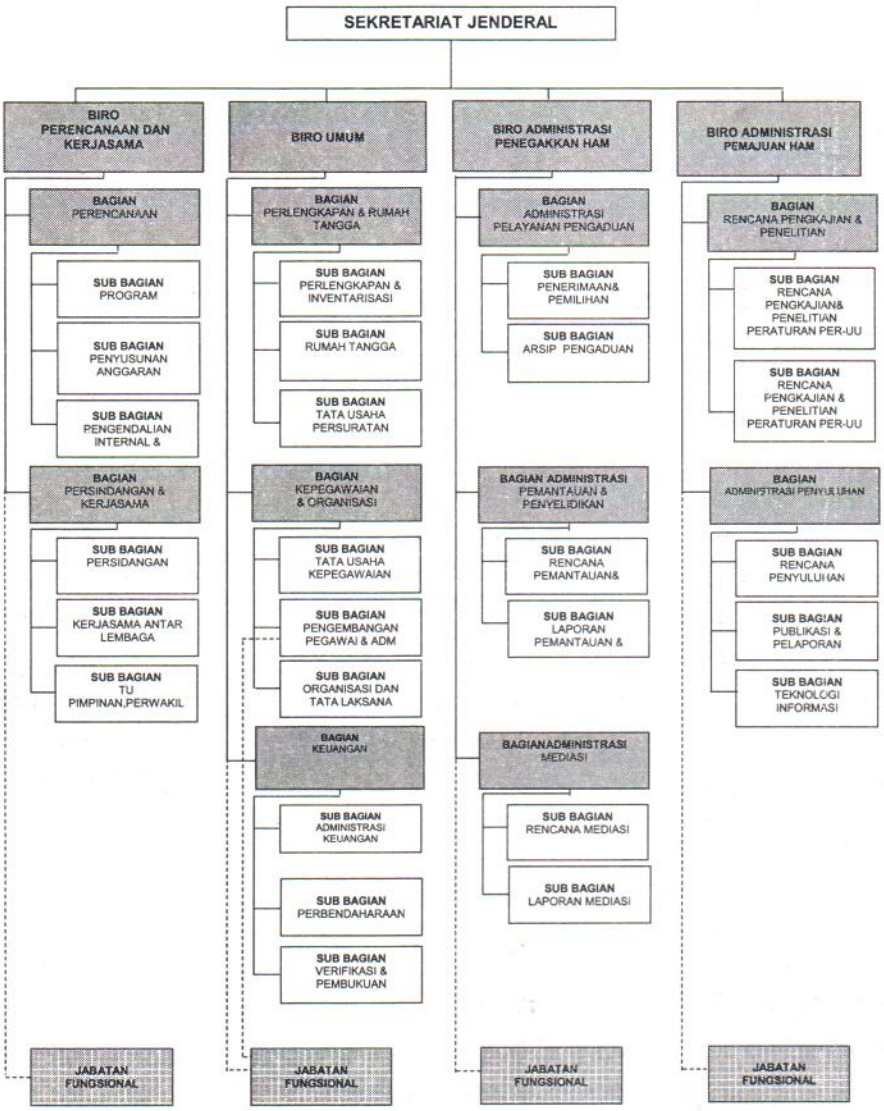
C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999



Sebagai pelaksanaannya, Sekretaris Jenderal Komnas HAM mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komnas HAM. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM



BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Adapun visi dari Komnas HAM adalah;

> ***Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.***

Motivasi utama dari keberadaan Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh menyeluruh, non diskriminatif dan berkelanjutan. Penciptaan yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjang nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;

3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (*social justice*);
6. Memperkuat kesadaran aparatur negara dan *civil society* atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (*stake-holder*) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.

3. Tujuan & Sasaran

Sejak berdirinya pada tahun 1993 hingga awal Juni 2004 pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dilaksanakan oleh Subkomisi yang dibentuk berdasarkan fungsi yaitu Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.

Tujuan strategis yang tercantum dalam Renstra Komnas HAM 2009-2013 :

1. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
2. Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM;
3. Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi;
6. Meningkatkan kualitas SDM;
7. Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

Sasaran Komnas HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai oleh Komnas HAM selama 2009-2013. Berikut adalah perinciannya :

No	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM
2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders
3.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna
4.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual
6.	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi
7.	Meningkatnya kemampuan SDM
8.	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program seperti yang telah tercantum dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga melalui kegiatan-kegiatan dalam satu tahun anggaran. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana kinerja terdiri dari dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

Berikut ini adalah Rencana Kinerja Komnas HAM TA 2009:

No	Sasaran	Indikator kinerja	target
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft

2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	13 MoU
3.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan
4.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	140 kasus
		Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi	60 kasus
		Jumlah SOP Pengaduan	1 Dokumen SOP Pengaduan
		Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	5.000 Berkas pengaduan
6.	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 Orang
		Jumlah laporan hasil ceramah/ diskusi/seminar/sarasehan	37 Laporan
		Jumlah laporan hasil diklat HAM	50 Laporan
		Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	12 Laporan
		Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	200 Eksemplar
7.	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang

8.	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai	244 Buah
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan

Seperti yang telah tercantum dalam tabel di atas, Komnas HAM menetapkan 9 sasaran utama. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Komnas HAM sebagai institusi yang mengemban amanah dalam bidang pengkajian penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM menempatkan keempat tugas dan fungsi di atas sebagai prioritas kegiatan. Kemudian menyusul prioritas kegiatan lain sebagai pendukungnya. Yang berarti bahwa anggaran untuk keempat tugas dan fungsi di atas akan lebih diutamakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perincian di formulir Penetapan Kinerja (lampiran).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian. Indikator kinerja terdiri dari input, proses, output, outcome, benefitt, dan impact. Dalam LAKIP Komnas HAM TA 2009 ini indikator yang dipakai hanya tiga yaitu input, output, dan outcome. Sedangkan indikator benefit dan impact belum dapat digunakan karena pengukuran dua indikator tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

Indikator input, output, dan outcome dari setiap kegiatan digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja, Komnas HAM melaksanakan 5 program dengan 22 kegiatan.

B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN I : Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM

Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk mencapai sasaran tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan 6 draft peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti ysng tertera dalam matrik di bawah ini :

No	SasaraN	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 draft	10 draft	166,67%	

Dari enam target peraturan perUUan yang direncanakan akan dikaji dan diteliti, Komnas HAM telah memperoleh capaian atas sasaran yaitu 166,67%. Dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM telah berhasil

melakukan pengkajian dan penelitian terhadap 10 peraturan perUUan yang berperspektif HAM. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hak Atas Pendidikan
2. Penelitian Hak Atas Kesehatan
3. Penelitian Hak Atas Anak
4. Penelitian Hak Atas Pekerja
5. Penelitian Pasar Tradisional
6. Penelitian terhadap Penyandang Cacat
7. Kajian Forum Eksternum (Kebebasan mendirikan rumah ibadah)
8. Kajian Optional Protokol (Protokol tambahan Hak Ekosob)
9. Kajian UU Pangan
10. Kajian UU 39/1999

Dalam pelaksanaaannya di lapangan, Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian tidak menemui adanya hambatan yang berarti dalam melakukan pengkajian dan penelitian atas peraturan perUUan. Namun kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2009 tersebut merupakan awal dalam pembuatan kebijakan sehingga masih harus ditindaklanjuti untuk penyempurnaannya.

Adapun rekomendasi atas tindak lanjut dari pencapaian sasaran sebagimana tersebut diatas adalah dengan menambah anggaran belanja Komnas HAM karena hasil kajian dan penelitian tersebut tidak akan berarti apabila tidak segera disahkan melalui mekanisme penetapan peraturan perUUan yang sah, sebagaimana peraturan perUUan yang lain. Tentunya proses untuk pengesahan peraturan perUUan tersebut mebutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu diharapkan Kementerian Keuangan dan Komisi III DPR RI membuat kesepahaman bersama bahwa tugas dan fungsi Komnas HAM perlu didukung oleh berbagai pihak.

SASARAN II : Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders

Dalam tahun anggaran 2009, Komnas HAM memiliki target menghasilkan 10 MoU dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM tetapi yang dapat terealisasikan dalam tahun anggaran 2009 sebanyak 9 MoU yang terdiri dari institusi pemerintah, NGO dan PusHAM seperti terlihat dalam matrik berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MoU	• Institusi pemerintah : 2 MoU • NGO dan PusHAM : 6 MoU	88,89%	

Sebagai perinciannya Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan sembilan institusi baik pemerintah maupun NGO dengan rincian: tiga dengan instansi pemerintah yaitu LPSK dan Komisi Yudisial. Sedangkan 6 MoU lainnya dengan NGO yaitu Human Rights Support Facilities (HRSF), Asia Pasific Forum (APF)/The Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions, The National Centre for Human Rights Jordan, Legal Development Facility (LDF) Australia, Norwegian Centre for Human Rights, dan Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand.

Dengan demikian dari total keseluruhan target/sasaran MoU sebanyak 10 MoU, terealisasi 9 MoU sehingga pencapaian sasarannya sebesar 88,89%.

Permasalahan dan kendala dalam mencapai sasaran II (meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders) adalah belum terjadinya sinkronisasi dan koordinasi antara program dan kegiatan Komnas HAM dengan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM. Hal tersebut terjadi karena permasalahan dan prioritas program dan kegiatan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM yang berbeda-beda.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kerjasama antara Komnas dengan stakeholders adalah dengan mengoptimalkan kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi dalam upaya peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM dengan stakeholderkas di daerah. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Komnas HAM mengharapkan adanya alokasi angaran khusus untuk kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi. Karena sampai saat ini kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Nanggro Aceh Darussalam, dan Papua belum memiliki alokasi anggaran untuk operasional kegiatan.

SASARAN III : Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna.

Dalam usaha melaksanakan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna dalam Tahun Anggaran 2009, Komnas HAM menargetkan 16 keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana. Persentase realisasi sasarannya dapat dilihat dalam matrik dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindak-lanjuti	16 keputusan	13 keputusan	81,25%	

Sidang paripurna Komnas HAM diselenggarakan sekurang-kurang satu kali dalam satu bulan. Sidang paripurna diselenggarakan antara Minggu I/ Minggu II pada setiap bulannya. Selain membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, dalam sidang paripurna juga dibahas isu-isu strategis yang berkenaan dengan intern kelembagaan Komnas HAM.

Berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM baik yang proyustisia maupun yang non proyustisia, apabila dipandang perlu, maka sidang paripurna akan mengeluarkan keputusan untuk pembentukan tim pelaksana

keputusan. Selama TA 2009 target pembentukan tim pelaksana sebanyak 16 tim pelaksana dengan realisasi sebanyak 13 tim pelaksana sehingga persentase pencapaiannya sebesar 81,25%.

Perincian tim pelaksana keputusan sidang paripurna TA 2009:

1. Tim Lapindo
2. Tim Kasus Kekerasan Polisi di Bengkalis
3. Tim RPP
4. Tim Munir
5. Tim Evaluasi Plt. Kabiro
6. Tim Aceh
7. Tim Dom Papua
8. Tim Penilaian Kinerja Perwakilan Komnas HAM Papua
9. Tim Pemilu
10. Tim Pekerja Migran
11. Tim Pengadaan CPNS
12. Tim Petrus
13. Tim 65

Sesuai dengan kebutuhan dan kasus pada tahun 2009, sidang paripurna membentuk 13 tim pelaksana keputusan. Sehingga target yang berjumlah 16 tidak terpenuhi.

SASARAN IV: Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara

Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk capaian sasaran tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan sebagaimana tercantum dalam matrik di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 laporan	2 laporan	100 %	
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggota-an	2 Keanggota-an	100 %	

Komnas HAM bergabung dengan dua lembaga internasional yang bergerak dalam bidang HAM yaitu APF dan ICC. Sehubungan dengan keanggotaan tersebut, Komnas HAM mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia pada bulan April dan Juni. Serta kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya, Komnas HAM juga berkewajiban untuk membayar iuran keanggotaan dalam APF dan ICC. Adapun besarannya adalah APF USD 3000/tahun (sekitar Rp 27.423.000,-/tahun), sedangkan untuk ICC sebesar 3.200 Euro/tahun (sekitar Rp 36.940.800/tahun).

Dalam pelaksanaan pembayaran dua keanggotaan tersebut Komnas HAM terpaksa harus menunggak karena pembayarannya dilakukan dalam bentuk dolar. Sementara kurs dolar yang tinggi tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Untuk antispasi pembayaran pada tahun anggaran selanjutnya Komnas HAM berupaya untuk mengalokasikannya sesuai dengan kurs dolar/ euro yang berlaku.

SASARAN V : Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual

Dalam Tahun Anggaran 2009, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki sasaran meningkatkan kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah-masalah aktual, seperti yang tercantum dalam matrik di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	200 kasus	154 kasus	77%	

Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator tecapai sebesar 77%. Capaian target kurang dari 80 % karena Bagian Administrasi pemantauan dan penyelidikan memiliki sumber daya manusia yang terbatas.

Komnas HAM mendapatkan pengaduan kasus sebanyak 5.819 berkas. Setelah dilakukan pemilahan terhadap kasus-kasus yang masuk, maka ada dua Bagian yang akan menanganinya yaitu Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Administrasi Mediasi. dari kasus yang diadukan ke Komnas HAM, di bawah ini adalah perinciannya :

Kriteria pelanggaran HAM

No.	Jenis Hak	Jumlah
1.	Hak memperoleh keadilan	1.845
2.	Hak atas kesejahteraan	1.652
3.	Hak atas rasa aman	1.004

Komnas HAM tidak hanya secara pasif menerima pengaduan, tetapi secara aktif langsung terjun di lapangan apabila ditemukan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat.

Dari hasil penerimaan pengaduan dan keaktifan Komnas HAM dalam penanganan kasus, Bagian Admininstrasi Pemantauan dan Penyelidikan berhasil menangani 79 kasus. Sedangkan Bagian Administrasi Mediasi berhasil melakukan mediasi terhadap 75 kasus. Sehingga total kasus yang ditangani Komnas HAM sebanyak 154 kasus. Total pencapaian sasaran sebesar 77%.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah terbatasnya mandat Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi selama ini, dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam UU 39/1999 Komnas HAM hanya diberi mandat sampai dengan memberikan

rekomendasi atas kasus yang ada tanpa kewenangan untuk melakukan eksekusi yaitu penyidikan dan penuntutan kepada pelaku.

Solusi yang dapat disampaikan Komnas HAM untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi III DPR RI segera membahas draft amandemen UU 39/1999 yang telah disusun Komnas HAM. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengemban tugas penanganan kasus pelanggaran HAM bisa melaksanakan tugasnya sampai paripurna.

SASARAN VI : Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi

Hak asasi manusia adalah hak mutlak seseorang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kelahirannya di dunia. Minimnya kesadaran HAM masyarakat merupakan tanggung jawab Komnas HAM untuk membuka kesadarannya. Di bawah ini adalah matrik capaian sasarannya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar	58 eksemplar	96,67%	-
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 orang	1970 orang	197%	-
		Jumlah media informasi tentang ham	37 laporan	37 laporan	100%	-
			50 laporan	50 laporan	100%	-
			12 laporan	12 laporan	100%	-
			76.000 eksemplar	10.700 eksemplar	14,08%	-

Dalam pemajuan HAM, Komnas HAM menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui berbagai media. Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, workshop, dan pendidikan pelatihan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Institusi pendidikan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,

dan perguruan tinggi juga menjadi sasaran penyelengaraan penyuluhan dan penyebaran informasi HAM.

Selain itu Komnas HAM juga menyelenggarakan perpustakaan di lantai 2 Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary no. 4B. Setiap orang yang berkeinginan untuk mengakses buku-buku tentang HAM bisa juga mengaksesnya melalui website Komnas HAM.

Berbagai media publikasi juga diselenggarakan oleh Komnas HAM, yang meliputi: Majalah SUAR yang terbit satu bulan sekali, Jurnal HAM yang dihasilkan satu kali dalam satu tahun serta Majalah Opini. Dari rencana/ target pencetakan/penerbitan sebanyak 76.000 eksemplar, realisasinya hanya tercapai 10.700 eksemplar atau 14,08%. Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi:

a. Keterbatasan SDM yang menangani *e-book* sehingga penyediaan fasilitas ini menjadi tidak maksimalnya untuk diakses pengunjung secara *online*.
b. Ukuran file yang dijadikan *e-book* terlalu besar sehingga melebihi kapasitas server website.

Rekomendasi atau tindak lanjut dari permasalahan tersebut :

a. Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani *e-book* perpustakaan *online*.
b. Memberikan pelatihan kepada beberapa staf agar dapat mengelola *content* perpustakaan *online*.
c. Memperbesar ukuran parameter *upload* agar dapat menampung file *e-book* yang lebih besar.

SASARAN VII : Meningkatnya kemampuan SDM

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di lingkungan Komnas Sekretariat Jenderal Komnas HAM, maka diselenggarakan diklat, baik itu diklat fungsional, struktural maupun teknis. Di bawah ini adalah matrik pencapaian sasarannya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 orang	25 Orang	56,82%	-

Penyelenggaraan diklat dilaksanakan dengan mengikuti jadwal badiklat/pusdiklat yang bekerjasama dengan Komnas HAM karena Komnas HAM belum memiliki badiklat/pusdiklat sendiri.

Dari matrik di atas, sasaran peningkatan kemampuan sumber daya manusia memiliki tiga macam kegiatan yaitu :

a. Diklat struktural. Pada tahun 2009 Komnas HAM mengirimkan 9 orang pegawai untuk mengikuti diklat struktural. Diklat struktural diperuntukkan untuk pegawai yang akan menempati jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Realisasi diklat struktural sebesar 100% dari 9 orang yang direncanakan akan didiklatkan.
b. Diklat teknis diperuntukan untuk pegawai Komnas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan dalam bidang keahliannya. Pada TA 2009 merencanakan sebanyak 20 orang pegawai yang akan didiklatkan, realisasinya 40% (8 orang).
c. Diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai Komnas HAM yang masih menempati posisi cpns untuk kemudian diangkat menjadi pns. Diklat ini ditujukan untuk membekali cpns dengan kemampuan dan pengetahuan dasar sehingga kelak dapat menjadi bekal bagi cpns yang bersangkutan. Realisasi peserta diklat prajabatan sebanyak 15 orang, realisasinya 53,33% (8 orang).

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut adalah masih minimnya alokasi anggaran untuk diklat sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, hanya 56,82% saja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kebutuhan mutlak yang harus di jalankan oleh setiap organisasi agar kinerja lembaga yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan zaman.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah :

1. Perlu menyusun daftar prioritas kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai.
2. Pembagian anggaran untuk pengembangan kapasitas pegawai lebih diprioritaskan.

SASARAN VIII : Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan

Komnas HAM berencana untuk membuka lagi beberapa kantor perwakilan di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terutama provinsi yang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Pada tahun 2009 Komnas HAM telah berhasil membentuk dua kantor sekretariat yaitu Kalimantan Barat dan Sumatera Barat sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Terbentuknya struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik pusat maupun daerah/ perwakilan	Jumlah satker komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 satker	2 satker	100 %	-

Berdasarkan matrik diatas, sasaran program dalam membentuk struktur kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik itu pusat maupun daerah/perwakilan dapat dipenuhi dengan tingkat pencapaian indikator yang sama yakni 100 %.

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah dua satker yang terbentuk belum terdaftar penganggarannya di Direktorat Sistem Penganggaran, Departemen Keuangan (yang sekarang disebut Kementerian Keuangan). Kegiatan tersebut merupakan awal dari rencana menengah Komnas HAM karena Komnas HAM berupaya dalam membentuk satker di

enam (6) provinsi. Sedangkan rencana jangka panjang Komnas HAM yaitu membentuk kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi di Indonesia.

Adapun rekomendasi atau tindak lanjut dari pencapaian sasaran tersebut adalah Komnas HAM merencanakan bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kantor perwakilan agar penanganan pelanggaran hak asasi manusia dengan segera dapat direspon.

SASARAN IX : Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM

Sekreatariat Jenderal Komnas HAM mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM. Tugas yang diselenggarakan diantara menyelenggarakan kegiatan administratif dan penyediaan sarana dan prasarana.

Selain hal-hal di atas, Sekretariat Jenderal juga berkewajiban untuk menyelenggarakan perencanaan kegiatan maupun anggarannya. Di bawah ini disajikan matrik sebagai penjelasannya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Ket
		Uraian	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang memadai	244 buah	200 buah	81,96 %	-
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 laporan	10 laporan 3 dokumen 3 dokumen	100 %	

Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian indikator tersebut berbeda-beda. Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai berhasil

mencapai target lebih besar dari angka 80 %. Hal ini dikarenakan telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar yang telah ditetapkan.

Jumlah laporan yang dihasilkan bagian Perencanaan dan Keuangan yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan yaitu 10 laporan monitoring dan evaluasi, 3 dokumen perencanaan, dan 3 laoran keuangan.

Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi adalah masih terbatasnya sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Solusi dan rekomendasi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dengan melakukan sosialisasi atas Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB IV
PENUTUP

LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari alokasi anggaran yang diperoleh setiap instansi yang mendapatkan anggaran dari APBN.

LAKIP Komnas HAM TA 2009 disajikan dalam tiga bab sesuai dengan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Yang meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja.

Semoga bermanfaat untuk bahan pengambilan keputusan Komnas HAM ke depan.

Rencana Stratejik
Tahun 2009 - 2013

Formulir RS

Instansi/Unit Organisasi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Visi : Terwujudnya Lembaga yang Mandiri dan Terpercaya dalam Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
Misi : 1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionlaitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia
3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial (social justice)
6. Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holders) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	Meningkatnya partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional	Program Perencanaan Hukum	
2.	Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga/organisasi, dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM	Jumlah instansi pemerintah, lembaga/organisasi, dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM	Membangun kerjasama dengan penyelenggara negara dan jaringan organisasi serta individual	Program Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya	
3.	Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan Sidang Paripurna	Jumlah keputusan Sidang Paripurna yang ditindaklanjuti	Pembentukan tim pelaksana keputusan Sidang Paripurna	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	

No.	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	1	2	3	4	5	6
4.	Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme HAM internasional sesuai jadwal	Menghadiri konferensi/pertemuan tingkat internasional	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	
			Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	Meningkatkan peran serta Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	Menyediakan sistem pelayanan pengaduan yang quick response	Program Penegakan Hukum dan HAM	
6.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	Pengembangan perpustakaan dan dokumentasi	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	
			Jumlah pengunjung perpustakaan	Promosi perpustakaan		
7.	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Penyelenggaraan diklat sesuai dengan kebutuhan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	
8.	Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Penambahan jumlah kantor perwakilan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	
9.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	
			Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan		Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2009

Instansi : KOMNAS HAM

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	Program Perencanaan Hukum	Pengkajian/penelitian peraturan perundangan dari perspektif HAM, permasalahan HAM, dan instrumen HAM	Jumlah hasil kajian dan penelitian peraaturan perUUan yang berperspektif HAM	Draft	6
2.	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MoU	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah	MoU	3
						Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM	MoU	6
3.	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pelanggaran HAM	Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	Keputusan	16
4.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM	Laporan	2
		Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembayaran luran organisasi internasional	Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM	Keanggotaan	2

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5.	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	200 Kasus	Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	Kasus	140
				Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Mediasi HAM	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi	Kasus	60
				Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyusunan Manual Pengaduan Online Komnas HAM	Jumlah SOP Pengaduan	Dokumen	1
				Program Penegakan Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di Subbag penerimaan pengaduan	Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Berkas	5,000
6.	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Jumlah buku yang telah dibeli	Eksemplar	60
		Jumlah pengunjung perpustakaan	1000 Orang	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1000

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan/Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	Laporan	37
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Jumlah laporan hasil diklat HAM	Laporan	50
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penyuluhan & Penyebaran informasi	Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	Laporan	12
				Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penerbitan majalah/jurnal	Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	Eksemplar	76,000
7.	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pengembangan Kapasitas/Administrasi/Manajemen SDM	Jumlah peserta diklat struktural	Orang	9
						Jumlah peserta diklat teknis	Orang	20
						Jumlah peserta diklat prajabatan	Orang	15

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
8.	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Satker	2
9.	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai	244 Buah	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	Buah	244
		Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	10
						Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3
						Jumlah laporan keuangan	Dokumen	3

FORM PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2009

Instansi : KOMNAS HAM

No.	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Perencanaan Hukum	Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan yang berperspektif HAM hasil kajian dan penelitian	6 Draft	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	2,004,718,000
2.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah	4 MoU	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	10 MoU	-
			Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM	6 moU			
3.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	13 Keputusan	3,045,189,000
4.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM	2 Laporan	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan	425,200,000
			Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM	2 Keanggotaan	Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan	29,100,000
5.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	140 Kasus	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	140 Kasus	4,142,569,000
			Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi	60 Kasus		60 Kasus	2,626,672,000
			Jumlah SOP Pengaduan	1 Dokumen		1 Dokumen	-
			Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	5.000 Berkas		5.000 Berkas	166,499,000
6.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah buku yang telah dibeli	60 Eksemplar	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 Eksemplar	173,450,000
			Jumlah pengunjung perpustakaan	1.000 Orang	Jumlah pengunjung perpustakaan	1.000 Orang	-
			Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	37 Laporan			2,437,653,000
			Jumlah laporan hasil diklat HAM	50 Laporan			1,714,825,000
			Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	12 Laporan			731,535,000
			Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	76.000 Eksemplar			640,754,000

No.	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	1	2	3	4	5	6	7
7.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Meningkatnya kemampuan SDM	Jumlah peserta diklat struktural	9 Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang	133,925,000
			Jumlah peserta diklat teknis	20 Orang			110,000,000
			Jumlah peserta diklat prajabatan	15 Orang			70,700,000
8.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	3 Satker	352,000,000
9.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	244 Buah	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai	244 Buah	710,385,000
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	10 Laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan	16 Laporan	213,839,000
			Jumlah dokumen perencanaan	3 Laporan			1,624,021,000
			Jumlah laporan keuangan	3 Laporan			1,051,794,000

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2009

Instansi : KOMNAS HAM

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM	Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan	6 Draft	10 Draft	166.67%
Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders	Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	9 MoU	8 MoU	88,89%
Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna	Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	16 Keputusan	13 Keputusan	81.25%
Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara	Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
	Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional	2 Keanggotaan	2 Keanggotaan	100.00%
Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP	200 Kasus	154 Kasus	77.00%
Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi	Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan	60 eksemplar	58 eksemplar	96.67%
Peningkatan kemampuan SDM	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	44 Orang	25 Orang	56.82%
Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan	Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	2 Satker	2 Satker	100.00%
Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai	244 Buah	200 Buah	81.97%
	Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan	16 Laporan	16 Laporan	100.00%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2009

Instansi : KOMNAS HAM

PROGRAM	KEGIATAN					PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Perencanaan Hukum	Pengkajian/penelitian peraturan perundangan dari perspektif HAM, permasalahan HAM. dan instrumen HAM	Input: Dana	Rp	2,004,718,000	1,644,888,258	82.05%
		Output: Jumlah draft peraturan perUUan yang berperspektif HAM hasil kajian dan penelitian	Draft	6	10	166.67%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Input: Dana	-	-	-	-
		Output: Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah	MoU	4	3	75.00%
		Input: Dana	-	-	-	-
		Ouput: Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM	MoU	6	6	100.00%
Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pelanggaran HAM	Input: Dana	Rp	3,045,189,000	2,978,599,279	97.81%
		Output: Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti	Keputusan	16	13	81.25%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM	Input: Dana Output:	Rp	425,200,000	229,073,066	53.87%

PROGRAM	KEGIATAN					PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM	Laporan	2	2	100.00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pembayaran luran organisasi internasional	Input: Dana	Rp	29,100,000	25,000,000	85.91%
		Output: Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM	Keanggotaan	2	2	100.00%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM	Input: Dana	Rp	4,142,569,000	3,792,159,410	91.54%
		Output: Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan	Kasus	140	79	56.43%
		Input: Dana	Rp	2,626,672,000	2,181,792,987	83.06%
		Output: Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi	Kasus	60	75	125.00%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Penyusunan Manual Pengaduan Online Komnas HAM	Input: Dana	-	-	-	-
		Output: Jumlah SOP Pengaduan	Dokumen	1	1	100.00%
Program Penegakan Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di Subbag penerimaan pengaduan	Input: Dana	Rp	97,821,000	97,820,500	100.00%
		Output: Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Berkas	5,000	5,819	116.38%

PROGRAM	KEGIATAN					PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input: Dana	Rp	173,450,000	124,366,384	71.70%
		Output: Jumlah buku yang telah dibeli	Eksemplar	60	58	96.67%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan	Input: Dana				
		Output: Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1,000	1970	197.00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Penyelenggaraan/Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	Input: Dana	Rp	2,437,653,000	2,325,753,800	95.41%
		Output: Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan	Laporan	37	37	100.00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	Input: Dana	Rp	1,714,825,000	13 1,459,135,700	85.09%
		Ouput: Jumlah laporan hasil diklat HAM	Laporan	50	50	100.00%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva	Penyuluhan & Penyebaran informasi	Input: Dana	Rp	731,535,000	495,892,300	67.79%
		Output: Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM	Laporan	12	12	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN					PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Penerbitan majalah/jurnal	Input: Dana	Rp	640,754,000	458,153,775	71.50%
		Output: Jumlah media yang berhasil dipublikasikan	Eksemplar	76,000	10,700	14.08%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pengembangan Kapasitas/Administrasi/Manajemen SDM	Input: Dana	Rp	133,925,000	99,365,000	74.19%
		Ouput: Jumlah peserta diklat struktural	Orang	9	9	100.00%
		Input: Dana	Rp	110,000,000	61,980,000	56.35%
		Ouput: Jumlah peserta diklat teknis	Orang	20	8	40.00%
		Input: Dana	Rp	70,700,000	61,420,000	86.87%
		Ouput: Jumlah peserta diklat prajabatan	Orang	15	8	53.33%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya	Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkelaniutan	Input: Dana	Rp	352,000,000	351,400,000	99.83%
		Ouput: Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi	Satker	2	2	100.00%
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor	Input: Dana	Rp	710,385,000	650,018,895	91.50%
		Ouput: Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia	Buah	244	200	81.97%
Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Input: Dana	Rp	213,839,000	213,346,500	99.77%

PROGRAM	KEGIATAN					PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Ouput: Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	10	10	100.00%
		Input: Dana	Rp	245,773,000	245,489,800	99.88%
		Ouput: Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3	3	100.00%
		Input: Dana	Rp	295,794,000	287,351,800	97.15%
		Ouput: Jumlah laporan keuangan	Dokumen	3	3	100.00%